

IDEOLOGI KONFLIK DAN KESELAMATAN KERJA WARTAWAN

*Oleh Muzayin Nazaruddin
Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi UII*

Artikel ini pernah dimuat di Harian Bernas Jogja, 15 Maret 2007

“Kalau terjadi sesuatu, maka yang ditanya kameranya dulu, bukan wartawannya.” Prinsip yang melekat dalam diri wartawan tersebut, yang semula hanya merupakan *joke*, telah meminta korban. Muhammad Guntur (36), kameraman SCTV, dan Suherman (31), kameraman Lativi, keduanya tewas bersama tenggelamnya kapal motor Levina I.

Sontak meninggalnya kedua wartawan tersebut memancing kembali perdebatan tentang keselamatan wartawan. Berbagai pihak, termasuk kalangan wartawan sendiri, merefleksikan tragedi tersebut sebagai bukti absennya *safety* dalam kerja jurnalistik. Para komentator kemudian menarik benang refleksi lebih jauh, menjadi sebuah generalisasi: rendahnya kesadaran tentang keselamatan wartawan, baik di kalangan wartawan sendiri maupun pengelola media.

Beberapa hal harus dipilah agar kita bisa menganalisis secara jernih dan tidak jatuh dalam *reflection without data*. Tragedi meninggalnya Guntur dan Suherman secara jelas menunjukkan absennya pertimbangan keselamatan diri wartawan. Kasus tersebut jelas, namun bisakah kita jadikan titik berangkat bagi sebuah generalisasi bahwa kesadaran akan keselamatan kerja di kalangan wartawan dan pengelola media masih rendah?

Ada baiknya kita mengupas survey AJI pada 2005 di 17 kota, di mana salah satu bagiannya menyajikan hasil survey tentang keselamatan wartawan (*Potret Jurnalis Indonesia*, AJI, 2006: 127-137). Tentang penting tidaknya keselamatan, 74,8 % responden (wartawan) menilai bahwa isu keselamatan jurnalis sangat penting di media tempat mereka bekerja. Namun, 83,8% responden menilai bahwa wartawan belum cukup terjamin keselamatannya ketika meliput di wilayah konflik. Lebih jauh, 97,1 % responden menyatakan pentingnya aturan mengenai keselamatan jurnalis yang secara jelas memberi perlindungan kepada wartawan ketika meliput wilayah konflik.

Data tersebut bisa kita tafsirkan kira-kira begini: kesadaran tentang keselamatan jurnalis sangat tinggi (74,8 %, bahkan 97,1 %), namun dalam tataran praktik liputan, khususnya di wilayah konflik, sebagian besar wartawan (83,8 %) menilai bahwa keselamatan mereka belum terjamin. Mengapa? Survey tersebut menjelaskan penyebabnya: 57,6 % responden menilai keselamatan jurnalis tidak menjadi perhatian kelompok masyarakat yang tengah bertikai, 49,6 % responden menyatakan bahwa keselamatan wartawan di wilayah konflik tidak menjadi perhatian pemerintah dan aparat keamanan.

Bagaimana kesadaran pengelola media? Survey AJI bahkan menempatkan media sebagai pihak paling dipercaya wartawan dalam memperjuangkan keselamatan mereka (81,5 %). Di bawah media, pihak yang dipercaya wartawan untuk memperjuangkan keselamatan mereka secara berurutan adalah organisasi jurnalis nasional (70 %), organisasi internasional yang bergerak di wilayah konflik (67 %), organisasi jurnalis internasional (62,8%), dan organisasi masyarakat yang bergerak di wilayah konflik (62,8 %). Khusus mengenai media, wartawan bahkan menilai *‘fasilitas’* yang mereka

peroleh dari media ketika meliput wilayah konflik sudah cukup layak, media menyediakan keperluan yang dibutuhkan wartawan selama liputan (85,4 %), mengurus administrasi dan perizinan (86,4 %), memberi jaminan dalam bentuk asuransi kecelakaan/asuransi jiwa (74,8 %).

Kesadaran wartawan dan media mengenai keselamatan jurnalis sudah cukup tinggi. Lalu, mengapa Guntur dan Suherman harus meninggal dalam kerja jurnalistik mereka? Apakah survey AJI di atas tidak cukup valid, atau Guntur dan Suherman adalah kasuistis, yang harus kita bincangkan dalam konteks spesifik kasusnya? Bukan keduanya. Dengan tingkat kesalahan (*sampling error*) 5 %, survey AJI cukup kuat dijadikan pijakan analisis. Begitu juga, Suherman dan Guntur bukan kasuistis, sangat mungkin terulang dalam kondisi yang serupa. Jawabannya ada pada sebuah kata: *konflik*.

Selama ini, para jurnalis, juga pengelola media, mengbingkai isu keselamatan jurnalis dalam satu kerangka: liputan di wilayah konflik. Isu keselamatan menjadi penting ketika seorang jurnalis akan meliput di wilayah konflik, sebaliknya ketika akan meliput di luar wilayah konflik – dalam berbagai latar, bencana, krisis politik, ataupun kondisi lainnya – isu keselamatan menjadi tidak penting lagi.

Bukti yang jelas adalah survey AJI sendiri. AJI membahas isu keselamatan jurnalis – menyajikannya dalam satu bab khusus – dalam bingkai liputan di wilayah konflik. Lihat misalnya kata pembuka yang digunakan untuk membahas hasil survey tentang keselamatan jurnalis, “*Kepada responden ditanyakan bagaimana kondisi keselamatan jurnalis saat ini dalam meliput konflik*” (Potret Jurnalis Indonesia, 2006: 127).

Lebih jauh, bingkai konflik bagi isu keselamatan jurnalis ini telah meresap dalam ideologi profesional wartawan maupun ideologi kapital media. Ideologi di sini dipandang sebagai suatu sistem kepercayaan atau pandangan hidup (*worldview*) yang dimiliki kelompok atau kelas tertentu untuk membela dan memajukan kepentingan mereka (Lull, 1995: 7).

Ideologi profesional telah menyatu dalam diri wartawan. Tafsir umum atas ideologi ini menyangkut akurasi dan objektivitas, aktualitas, *cover multi side*, dan keaslian (anti plagiarisme). Tafsir umum tersebut menunjukkan idealitas wartawan: mengejar eksklusivitas, dalam rangka tanggung jawab (sekaligus karir) jurnalistik mereka. Ketika meliput di wilayah konflik, terdapat tafsir tambahan atas ideologi ini, yaitu keselamatan jurnalis. Artinya, keselamatan merupakan bagian dari profesionalitas ketika meliput di wilayah konflik. Namun, di luar wilayah konflik, ideologi profesional telah menomorsekiankan keselamatan wartawan, bahkan mengkontraskan. Idealisme yang dibingkai profesionalitas untuk menghasilkan berita ‘eksklusif’, seringkali membuat wartawan secara sadar ataupun tidak mengabaikan keselamatan dirinya.

Dalam tragedi tenggelamnya Levina I, menyampaikan informasi kepada publik mengenai penyebab terbakarnya kapal penumpang tersebut jelas merupakan tanggung jawab profesi mereka. Namun, pada saat bersamaan, profesionalisme itu menyebabkan mereka abai akan keselamatan diri, di mana semua wartawan yang menaiki bangkai Levina tidak memakai pelampung, padahal sebagian mereka tidak bisa berenang. Meminjam sebentar analisis Freudian, instink dasar manusia untuk melindungi diri sendiri telah tergantikan oleh instink dasar ‘*khas wartawan*’ untuk mengejar berita.

Di sisi lain, ideologi kapital adalah '*fitrah*' pengelola media. Di mata pengelola media, informasi akan dipandang dari nilai ekonomi. Wartawan sebagai aset pemproduksi berita harus benar-benar dijaga ketika keselamatannya terancam, terutama di wilayah konflik. Namun, di luar wilayah konflik, yang penting bagi media adalah bagaimana wartawan menghasilkan berita yang akurat dan eksklusif. Jelas, dari tatapan ideologi ini, keselamatan bukan menjadi prioritas.

Dalam wilayah konflik, keselamatan wartawan memang vital, namun 'bingkai' ini membuat kita lalai akan keselamatan wartawan dalam berbagai konteks liputan lainnya. Padahal, kita tahu persis, negeri ini adalah negeri bencana, berbagai bencana silih berganti menerjang wilayah-wilayah di negeri ini. Dalam liputan bencana, wartawan juga menghadapi berbagai kondisi yang mengancam keselamatannya.

Maka, sudah saatnya para jurnalis dan pengelola media membingkai keselamatan kerja jurnalis dalam seluruh konteks kerja jurnalistik, tidak hanya di wilayah konflik, sama posisinya dengan jaminan keselamatan dan kesehatan kerja (KKK) di perusahaan pada umumnya.

Keselamatan kerja wartawan dalam lingkup luasnya ini harus menjadi agenda utama seluruh perusahaan media, juga asosiasi-asosiasi jurnalis. Agenda penting ini secara mendasar harus dimulai dengan penyusunan panduan kerja bagi wartawan, di mana salah satu bagiannya mengatur keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan kerja jurnalis. Langkah penting selanjutnya adalah pemberian pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja bagi wartawan. Terakhir, melengkapi wartawan, dalam konteks liputan apapun, dengan perlengkapan keselamatan serta asuransi.